

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PENGRAJIN DALAM MEMILIKI NPWP DI KABUPATEN GIANYAR

I Putu Waras Wirapati<sup>1</sup>  
I Ketut Jati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail: waraswirapati@ymail.com/telp: +62 81 91 62 86 866

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Permasalahan dalam kepatuhan perpajakan masih menjadi permasalahan mendasar di Indonesia. Salah satu indikator dari kepatuhan perpajakan adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mengingat kepatuhan WP dalam memiliki NPWP merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu pengkajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pemahaman WP, penghasilan WP, manfaat yang dirasakan WP dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan WP dalam hal ini Pengrajin dalam memiliki NPWP di Kabupaten Gianyar. Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner sejumlah 58 kuesioner kepada Pengrajin di Kecamatan Tegalalang dan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman WP, penghasilan WP, manfaat yang dirasakan WP dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Pengrajin dalam memiliki NPWP.

**Kata kunci:** pemahaman WP, kepatuhan pengrajin

### ABSTRACT

*The tax compliance problem is a fundamental problem in Indonesia. One kind indicator of tax compliance is to have a Taxpayer Identification Number (TIN). Given the taxpayer compliance have a TIN is an important factor for the increase in tax revenue, it is necessary to study the factors that affect adherence in Taxpayer have a Taxpayer Identification Number (TIN). The purpose of this study to determine whether the Taxpayer understanding of tax, Taxpayer income, the perceived benefits of Taxpayer and Taxpayer compliance sanctions affecting the tax in this case to have a TIN of Craftsmen in Gianyar regency. This research used a multiple linear regression techniques. Data were obtained through of 58 questionnaires of the Craftsmen in District of Tegalalang and Tampaksiring Gianyar. The results showed that the Taxpayer understanding, Taxpayer income, the perceived benefits of Taxpayer and tax penalties positive effect on compliance in the Craftsmen to have a TIN.*

**Keywords:** taxpayer understanding, compliance of craftsmen

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam struktur penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak mengalami peningkatan dari tahun ketahun, yaitu untuk

tahun 2010 jumlah penerimaan pajak Rp. 743 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 839 triliun dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 1.019 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Meskipun penerimaan dari sektor pajak sudah cukup besar, namun penerimaan dari pajak tersebut memungkinkan untuk ditingkatkan lagi. Salah satu cara yang digalakan pemerintah untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak tersebut ialah melalui perluasan basis pajak. Melalui perluasan basis pajak akan mempengaruhi peningkatan jumlah WP yang terdaftar. Melalui peningkatan jumlah WP terdaftar tersebut, pemerintah berharap semakin meningkat pula jumlah WP yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan nantinya penerimaan negara dari pajak mengalami peningkatan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memperluas basis pajak tersebut adalah mendorong masyarakat yang telah memiliki persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai WP dan memiliki NPWP (Untari, 2009).

Permasalahan dalam kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu dari permasalahan tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat WP terdaftar apabila dibandingkan dengan jumlah WP potensial di dalam negeri. Hingga tahun 2012 jumlah WP potensial di Indonesia ialah sebesar 67 juta orang. Dari jumlah tersebut, jumlah WP yang telah terdaftar berjumlah 20 juta orang, sehingga rasio tingkat kepatuhan WP dalam memiliki NPWP hanya 30% dari jumlah WP potensial yang ada ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Permasalahan senada juga terjadi di kabupaten Gianyar, hal tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah Pengrajin di kabupaten Gianyar yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Perbandingan jumlah Pengrajin yang ada di kabupaten

Gianyar dengan Pengrajin yang telah terdaftar di KPP Pratama kabupaten Gianyar dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan jumlah Pengrajin yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gianyar dengan Pengrajin yang aktif terdaftar di KPP Pratama Gianyar**

Tahun	Jumlah pengrajin tercatat di Disperindag Kab. Gianyar (orang)	Jumlah pengrajin aktif terdaftar di KPP Pratama Gianyar (orang)	Persentase (%)
2009	558	164	29,39 %
2010	606	218	35,97 %
2011	630	271	43,01 %
2012	667	299	44,82 %

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gianyar (2013)

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 sampai 2012 terjadi peningkatan jumlah Pengrajin di Kabupaten Gianyar dan diiringi pula dengan kenaikan jumlah Pengrajin yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar, tetapi jumlah peningkatan Pengrajin terdaftar tidak sebanding jumlah Pengrajin yang ada di Kabupaten Gianyar. Hal tersebut terlihat dari jumlah Pengrajin yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Gianyar hanya mencapai 44,82 persen dari jumlah Pengrajin di Kabupaten Gianyar. Sedangkan sisanya sebesar 55,18 persen masih belum mendaftarkan dirinya dan belum memiliki NPWP. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Gianyar masih terdapat permasalahan kepatuhan WP terutama dari sektor industri kerajinan dalam memiliki NPWP.

Dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan Pengrajin dalam melakukan kewajiban perpajakannya, terutama kewajiban untuk memiliki NPWP maka penting untuk dikaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

kepatuhan WP khususnya Pengrajin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk memiliki NPWP. Pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan merupakan cara WP dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. WP yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi WP yang tidak taat (Hardyningsih, 2011). Penelitian Suryadi (2006) menjelaskan bahwa pemahaman WP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP orang pribadi. Penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan WP dibentuk oleh dimensi pemahaman WP itu sendiri. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan dari masyarakat melalui pendidikan formal ataupun nonformal, maka dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP tersebut. WP akan menjadi patuh dalam mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP (Putri, 2011). Banyak manfaat yang dapat diperoleh WP yang memahami pentingnya memiliki NPWP. Misalnya, kemudahan pengurusan administrasi perpajakan, kemudahan pengajuan kredit Bank dan lain sebagainya (Prastowo, 2009:17).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2006) menemukan bahwa persepsi WP tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penelitiannya menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memiliki NPWP adalah penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2011) menemukan bahwa penghasilan WP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP dalam memiliki NPWP.

Berdasarkan pemaparan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Pemahaman WP berpengaruh positif pada kepatuhan Pengrajin dalam memiliki NPWP

H<sub>2</sub>: Penghasilan WP berpengaruh positif pada kepatuhan Pengrajin dalam memiliki NPWP

H<sub>3</sub>: Manfaat yang dirasakan WP berpengaruh positif pada Kepatuhan Pengrajin dalam memiliki NPWP

H<sub>4</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Pengrajin dalam memiliki NPWP.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar. Objek penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak, penghasilan Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Pengrajin dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 58 Pengrajin.

### **Kepatuhan WP**

Kepatuhan WP menurut Kriyanto (2000) adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Kepatuhan WP tersebut diukur dengan indikator (Prakoso, 2011) sebagai berikut.

- 1) Memiliki NPWP merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan

- 2) Memiliki NPWP berarti saya menjadi warga negara yang taat pajak
- 3) Pemahaman terhadap ketentuan peraturan perpajakan

### **Pemahaman WP**

Pemahaman WP adalah suatu hal yang dipahami atau dimengerti oleh WP terkait peraturan perpajakan. Pemahaman WP tersebut diukur dengan indikator (Prakoso, 2011) sebagai berikut.

- 1) Pengertian NPWP
- 2) Kewajiban memiliki NPWP bagi orang pribadi
- 3) Sifat NPWP
- 4) Kepemilikan NPWP didasarkan pada pemahaman kewajiban perpajakan

### **Penghasilan WP**

Mengacu pada definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan maka Penghasilan WP adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh WP. Penghasilan WP tersebut diukur dengan indikator (Prakoso, 2011) sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan NPWP didasarkan pada besar tingkat penghasilan
- 2) Kepemilikan NPWP didasarkan pada kecukupan penghasilan WP

### **Manfaat yang Dirasakan WP**

Manfaat yang dirasakan WP merupakan kegunaan yang dirasakan oleh WP jika memiliki NPWP. Manfaat yang dirasakan WP tersebut diukur dengan indikator (Prakoso, 2011) sebagai berikut.

- 1) Pengenaan pajak lebih rendah

- 2) Kemudahan mengurus administrasi
- 3) WP lebih patuh apabila memperoleh manfaat memiliki NPWP

### **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar WP tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:47). Sanksi pajak tersebut diukur dengan indikator (Prakoso, 2011) sebagai berikut.

- 1) Sanksi berupa tarif pemotongan pajak yang lebih tinggi
- 2) Sanksi pidana penjara
- 3) Sanksi denda
- 4) Sanksi administrasi membuat WP memiliki NPWP

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memperlihatkan informasi karakteristik variabel-variabel penelitian (nilai minimum, maksimum, rata-rata dan *standar deviasi*) dengan N merupakan banyaknya responden dalam penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel pemahaman WP memiliki nilai minimum sebesar 7,00, nilai maksimum sebesar 16,00, rata-rata sebesar 12,55, dan standar deviasi sebesar 2,30. Variabel

penghasilan WP memiliki nilai minimum sebesar 4,00, nilai maksimum sebesar 8,00, rata-rata sebesar 6,10, dan standar deviasi sebesar 1,16. Variabel manfaat yang dirasakan WP memiliki nilai minimum sebesar 5,00, nilai maksimum sebesar 12,00, rata-rata sebesar 9,06, dan standar deviasi sebesar 1,59. Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 6,00, nilai maksimum sebesar 16,00, rata-rata sebesar 12,20, dan standar deviasi sebesar 2,21. Variabel kepatuhan WP memiliki nilai minimum sebesar 5,00, nilai maksimum sebesar 12,00, rata-rata sebesar 9,15, dan standar deviasi sebesar 1,81.

**Tabel 2.**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Std.Deviation</b>
Pemahaman WP	58	7,00	16,00	12,55	2,30
Penghasilan WP	58	4,00	8,00	6,10	1,16
Manfaat yang Dirasakan WP	58	5,00	12,00	9,06	1,59
Sanksi Pajak	58	6,00	16,00	12,20	2,21
Kepatuhan WP	58	5,00	12,00	9,15	1,81

Sumber: Data Primer Diolah

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Hasil analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman WP, penghasilan WP, manfaat yang dirasakan WP, dan sanksi pajak pada kepatuhan Pengrajin dalam memiliki NPWP di kabupaten Gianyar dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan nilai F signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel pemahaman WP, penghasilan WP, manfaat yang dirasakan WP,

dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP di Kabupaten Gianyar.

**Tabel 3.**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig. t
Pemahaman WP	0,183	2,186	0,033
Penghasilan WP	0,331	2,859	0,006
Manfaat yang dirasakan WP	0,300	2,559	0,013
Sanksi Pajak	0,259	3,511	0,001
Persamaan Regresi: $Y = -1,033 + 0,183X_1 + 0,331X_2 + 0,300X_3 + 0,259X_4$		Konstanta	-1,033
		R square	0,892
		F sig	0,000

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil pengujian variabel pemahaman WP pada Tabel 3 menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,183 dan nilai sig. t sebesar  $0,033 < 0,05$  yang berarti variabel pemahaman WP berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP. Hasil pengujian variabel penghasilan WP pada Tabel 3 menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,331 dan nilai sig. t sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti variabel penghasilan WP berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP. Hasil pengujian variabel manfaat yang dirasakan WP pada Tabel 3 menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,300 dan nilai sig. t sebesar  $0,013 < 0,05$  yang berarti variabel manfaat yang dirasakan WP berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP. Hasil pengujian variabel sanksi pajak pada Tabel 3 menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,259 dan nilai sig. t sebesar  $0,001 < 0,05$  yang berarti variabel sanksi pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP.

### **Hasil Pengujian Hipotesis**

Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel pemahaman WP, berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP yang berarti semakin baik pemahaman WP, maka dapat meningkatkan kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyo (2011), yang menemukan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel penghasilan WP, berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP yang berarti semakin besar penghasilan WP maka dapat meningkatkan kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP. WP yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dari pada WP yang berpenghasilan lebih rendah. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prakoso (2011), menemukan bahwa Wajib Pajak mendaftarkan diri memiliki NPWP karena besarnya penghasilan yang mereka terima sehingga penghasilan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memiliki NPWP.

Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel manfaat yang dirasakan WP, berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP (Y) yang berarti semakin banyak manfaat yang dirasakan ketika memiliki NPWP maka dapat meningkatkan kepatuhan pengrajin dalam

memiliki NPWP. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2012), menemukan bahwa pemilik UMKM memilih untuk memiliki NPWP dikarenakan merasakan banyak manfaat dengan memiliki NPWP.

Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak, berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP yang berarti semakin baik sanksi perpajakan ditegakkan dapat meningkatkan kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prakoso (2011), menemukan bahwa sanksi pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada IGTKI-PGRI Kecamatan Kepanjen. Semakin ketat dan berat sanksi pajak yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam memiliki NPWP meningkat. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP, Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP, Manfaat yang dirasakan Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP, dan Sanksi Pajak

berpengaruh positif pada kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel dari keseluruhan Pengrajin yang terdaftar memiliki NPWP di Kabupaten Gianyar. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kepatuhan keseluruhan Pengrajin dalam memiliki NPWP.

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel. Hal ini dikarenakan Pengrajin tidak hanya dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yaitu pemahaman Wajib Pajak, penghasilan Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak dan sanksi pajak, tetapi masih banyak faktor-faktor lain seperti sosialisasi, pelayanan dan administrasi perpajakan yang mempengaruhinya dengan harapan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak, penghasilan Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak dan Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pengrajin dalam memiliki NPWP, maka dalam hal ini peneliti menyarankan kepada Direktorat Jendral Pajak supaya melakukan penyuluhan lebih mendalam lagi mengenai kepatuhan perpajakan khususnya dalam memiliki NPWP.

## **REFRENSI**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Burton, Richard dan Ilyas, Wirawan B. 2004, *Hukum Pajak*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

- Cahyo, Gatut Wahyu Tri. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Skripsi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Hardyningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. 3(1) : h: 126 – 142
- Hutagaol, John dkk. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. 6(2): h: 186-193.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. 2008. *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Survei Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta: BPFY – Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery setiawan. 2009. Pengaruh Presepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Denpasar Timut. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume 2. h: 1-23
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prastowo, Yustinus. 2009. *Manfaat dan Risiko Memiliki NPWP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Prakoso, Iswanto Priyo. 2011. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)” (Studi Empiris pada IGTKI-PGRI Kecamatan Kepanjen). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Putri, Wike Puspasari. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Jurnal*

- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakepatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik*. 5(1): h: 85-31.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume 4. h: 214 – 219.
- Suryadi. 2006. Model kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survey di wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*. 4(1): h:105-121.
- Tarjo dan Kusumawati, Indra. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. 10(1): h: 101-120.
- Zain. Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.